

ANALISIS KETETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA TELEPON

Sadiani*

Abstract

This research to know the consideration punish the Justice of Religion of South Jakarta in making stipulating of marriage authenticity by phone and evaluate the positive law to consideration punish the religion justice in making stipulating of marriage authenticity by phone. Type of research of juridical normative about verdict of religion justice, while type of research of case study that is context of decision of marriage authenticity by phone the public versus opinion nature of research explanatory, explaining, strengthening, testing and even memo of theory or hypothesizing. Result of research that law consideration specified Justice of Religion of South Jakarta about marriage authenticity by phone to have the insufficiency seen from law method used and have implication to opinion object among jurist from Islam people, cause not mention the method punish the emergency in the balance punish. Law enforcement of marriage in perspective of positive law visible from juridical factor, valid marriage if noted or have got the justice decision; factor sociologies, applying right have to be elastic and flexible specially concerning technical marriage execution seemly is reality faced by the society; philosophic factor, applying right have to have the sense of justice and benefit ground and also express the system assess in society. The reality marriage by phone to represent one of opportunity of law renewal desired the pursuant to creativity of judge of religion justice to specify the marriage authenticity. Even method used in the balance punish still have the weakness, at least judge have coped to specify the marriage status by digging norm punish to answer the problem which not yet been arranged specifically in regulation.

Key Words : Keabsahan Perkawinan, Media Telepon.

* Penulis adalah dosen Mata Kuliah *Fikih Munakahat*, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya

A. Pendahuluan

Akad nikah melalui telepon merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengingat peristiwa tersebut belum di prediksi oleh ulama fikih terdahulu bahwa masa sekarang akan muncul peristiwa yang kurang relevan dengan ketentuan hukum yang dalam kitab-kitab fikih sebelumnya sehingga manakala muncul peristiwa nikah media telepon, para ahli hukum yang kompeten menangani masalah tersebut menghadapi kendala untuk menyatakan sah atau tidaknya peristiwa tersebut, mengingat baik secara teknis maupun normatif bahwa peristiwa nikah jarak jauh menggunakan sarana telepon memang tidak pernah diatur sebelumnya. Sehubungan dengan itu, muncul kasus yang telah mendapat legitimasi melalui Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 dan telah dikodifikasi dalam bentuk literatur Islam kontemporer dengan memaparkan perbedaan pandangan individu dan kelompok ahli hukum Islam tentang keabsahan perkawinan melalui telepon¹. Mengingat buku yang dihimpun oleh Satria Effendi tersebut belum memberikan kontribusi hukum secara tegas atas pro dan kontra perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum Islam tentang status perkawinan melalui media telepon yang telah mendapat legitimasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk itu penulis melakukan pengkajian secara khusus guna mengurangi timbulnya *snow-balls-effect* atas hasil Ketetapan dimaksud. Alasan yang berkembang tentang keabsahan perkawinan tersebut mengingat pernikahan tidak dilakukan dalam satu majelis sebagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i hingga diragukan keabsahannya. Meski demikian, justru kasus praktik pernikahan melalui telepon kembali terjadi sebagaimana dilansir koran "Banjarmasin Post" bahwa telah terjadi pelaksanaan pernikahan pasangan antar pulau melalui telepon yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007, karena "Cuaca Buruk Nikah Menggunakan Hand Phone *Third generation*"².

¹ Satria Effendi, 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media. hal. 1-29

² Koran Banjarmasin Post. Selasa 9 Januari 2007. Hal. 12. 3G atau *third generation* adalah teknologi generasi ketiga untuk telepon seluler. Teknologi ini untuk mempercepat berbagai

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), hakim harus membuat putusan berdasarkan hati nuraninya meskipun belum ada ketentuan undang-undang yang kongkrit mengenai hal itu mengingat hakim bukan sekedar melaksanakan undang-undang ataupun menciptakan hukum, tetapi juga “menemukan hukum”. Berdasarkan hal di atas perumusan masalahnya: (1) bagaimanakah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam membuat Penetapan keabsahan nikah melalui media telepon? (2) Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam membuat Penetapan keabsahan nikah melalui media telepon?

Dari permasalahan tersebut, maka kegunaan penulisan untuk mengungkapkan analogi dan argumentasi hukum yang dapat dijadikan alasan tentang sah-tidaknya pernikahan melalui media telepon dihubungkan dengan penemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum relevansinya dengan hukum Islam dan hukum positif dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dewasa ini.

B. Metode Penulisan

Objek penulisan ini konteksnya dengan konsep kekosongan hukum di bidang perkawinan, penulis menggunakan analisis penemuan hukum melalui pendekatan multi disipliner keilmuan diantaranya pendekatan *Ushul Fiqih*³,

komunikasi pada telepon seluler. Kapasitas data yang dikirim juga semakin besar. 3G dikembangkan di Jepang tahun 2001, di Eropa sekitar tahun 2003, sedangkan di Indonesia dikembangkan tahun 2006. Adapun yang membuat telepon seluler 3 G dikatakan canggih adalah *video call* atau *video telephone*, artinya kita bisa saling melihat dengan lawan yang berbicara dan begitu sebaliknya, jika kedua pihak yang saling menelpon menggunakan jenis telepon 3G.

³ Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta : Logos. Hal. 4. Lihat. Abdul Wahab Khallaf. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. IV. Jakarta : rineka Cipta. Hal 58. Lihat. Amir Muallim Yusdani. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Cet. I. Yogyakarta : UII Press. Hal. 38

pendekatan sistemik, historis-filosofis, sosiologis-teleologis dan pendekatan kritis.⁴ Jenis analisis yang digunakan, yuridis normative.⁵ Tipe kajiannya, filsafat hukum bertolak dari premis normatif yang bersifat *self evident* diderifasi melalui metode logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif dan hukum Islam guna menganalisis Penetapan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan melalui media telepon. Tipe Penulisan, *case-study* tentang polemik keabsahan perkawinan melalui telepon yang dinyatakan sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada tingkat filosofis melihat konsepsi akad nikah melalui media telepon sebagai implementasi yuridis justru dapat menimbulkan *snow-balls-effect-case*. Sifat Penelitian, *eksplanatoris*; menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta hasil-hasil penelitian (argumentasi) yang telah ada.⁶ Jenis Bahan Hukum meliputi 3 (tiga) hal⁷: bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan Tertier. Studi kepustakaan melalui *card system* dengan menganalisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif⁸ disusun secara sistematis dengan *legal reasoning* secara integral, dengan metode interpretasi⁹.

C. Pemaparan Hasil dan Analisis Hukum

1. Pemaparan Hasil

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Menetapkan Keabsahan Perkawinan Melalui Media telepon dalam Surat

⁴ Roberto Mangabeira Ungger.1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).Jakarta.Cet.I.Hal.xxiii-xxix.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. CV.Rajawali. Jakarta Utara. Hal. 14-15.

⁶ Bambang Waluyo.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.9.

⁷ *Ibid*.

⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono.1994. *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni.

Bandung.Edisi.I.Hal.150

⁹ H. Noeng Muhajir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin. Cet.IV.Hal.314.

Ketetapan No. 1751/P/1989, diantaranya bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1989 telah diperiksa dan dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah mode A dengan No: 12/5/V/1989-No: D/V/8596/696/III/1989. Pihak PPN/KUA, Kecamatan Kebayoran Baru menghendaki adanya surat "TAWKIL" dari pihak temanten putra Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo yang ada di Amerika Serikat sampai menjelang pelaksanaan nikah tidak terpenuhi. Selanjutnya akad nikah dilakukan secara langsung oleh pihak wali nikah dengan temanten putra. Pemohon telah menikahkan anaknya yang bernama Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap dengan seorang laki-laki bernama Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo pada tanggal 13 Mei 1989 dengan wali pemohon sendiri. Pemberian mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan gelang emas 10 gram tunai serta disaksikan oleh H. Abdullah Sa'ad dengan Sunaryo. Maka Pertimbangan Hukum yang Tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai berikut:

Pertama, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan *Ijab* oleh wali ayah kandung (Pemohon) dari temanten putri yang berada di Jakarta dan *qabul* dilakukan sendiri oleh temanten putra (Drs, Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo) yang berada di Bumington Amerika Serikat melalui telepon.

Kedua, bahwa yang menjadi titik persoalan adalah bahwa baik dalam persidangan maupun di luar sidang ditemukan adanya *pelaksanaan akad nikah tidak di satu tempat melainkan di dua tempat yang berjauhan* yaitu temanten putri dan walinya selaku yang mengijabkan di Jakarta, temanten putra penerima/mengucapkan *qabul* berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru tidak mau mengeluarkan dan memberikan buku nikahnya, kepada pemohon, sebagai bukti autentik atas pernikahannya. Bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi I di atas sumpahnya yang mengatakan bahwa ia telah melarang kepada kepala KUA Kebayoran Baru untuk menikahkan serta melakukan pencatatan dan tidak benar ia telah mengizinkan sebagaimana yang dikatakan pemohon dan Kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru tersebut.

Ketiga, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan keterangan saksi I, saksi III dan Pemohon tentang boleh tidaknya menikahkan karena keterangan tersebut hanya menyangkut masalah tata kerja pegawai Pencatat nikah, bukan masalah sah dan tidaknya perkawinan.

Keempat, berdasarkan atas kerelaan antara suami dengan isteri dan untuk mengetahui adanya kerelaan antara keduanya, maka diadakan apa yang dinamakan *Ijab* dan *Qabul*. Jadi *ijab* dan *qabul* ini adalah penegasan dari adanya kerelaan, juga harus disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa antara pria dengan wanita itu telah menjadi suami-isteri.

Kelima, bahwa berdasarkan bukti rekaman kaset yang diperdengarkan di hadapan Majelis hakim dan keterangan para saksi yang telah di sumpah dari saksi II sampai dengan saksi XII dimana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan antara para saksi yang berada di Jakarta dengan para saksi yang di Amerika Serikat saling membenarkan bunyi rekaman kaset dan kebenaran tentang adanya pernikahan antara Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap dengan Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo, selain bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti pula bahwa dalam pernikahan terdapat antara lain: Pendaftaran, temanten putra dan putri, wali temanten putri, dua orang saksi, mahar, adanya *ijab* dan *qabul* dari wali temanten putri dengan temanten putra, adanya kerelaan/persetujuan kedua belah pihak, telah tercapainya usia nikah bagi kedua temanten, tidak ada larangan antara temanten putri dan temanten putra, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1, 7 dan 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 9 tahun 1975.

Keenam, bahwa ketidakhadiran secara phisik temanten putra di tempat temanten putri atau walinya yang mengijabkan, tidak mengurangi sahnya pernikahan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ahli Fiqih di dalam *Fiqhus Sunah* halaman 34 jilid II. Didukung dengan hadis Nabi Muhammad riwayat dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Nabi Saw pernah meminta dirinya untuk

mewakili pernikahan pasangan calon pengantin, setelah keduanya rela untuk diwakili oleh Nabi, meski tanpa ada surat kuasa kemudian Nabi mengawinkannya. Hal ini berarti merupakan kesepakatan saja, menurut Sayyid Sabiq berdasarkan praktek yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tersebut, jelas tidak ada bentuk yang pasti, yang jelas. Asalkan kedua calon isteri dan suami bukan orang yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta ke dua orang suami isteri itu saling merelakan. Berarti bahwa pelaksanaan Nikah tidak ada hal yang bersifat *Ta'abudy*, tetapi caranya bermacam-macam. Oleh karena itu apabila perkawinan itu sudah memenuhi syarat, maka sah akad nikah tersebut.

Ketujuh, bahwa buku nikah atau surat lainnya yang mempunyai nilai yang sama sangat dibutuhkan sekali oleh pemohon.

Kedelapan, bahwa Pemohon telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan sesuai dengan dalil dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV yang berbunyi: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat pernikahan.

Kesembilan, bahwa kedua mempelai saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima, sesuai dengan dalil dari kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV hal 308 yaitu:

يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ.

Kesepuluh, bahwa berita acara dalam sidang merupakan bagian dari pada penetapan ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan dan biaya perkara dibebankan terhadap Pemohon.

2. Analisis Hukum

Dari berbagai pertimbangan hukum yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di atas, maka fokus masalah terjadinya perbedaan pendapat menitikberatkan pada penetapan sahnya perkawinan menggunakan

telepon yang dilakukan secara langsung meski tidak satu majelis, padahal pernikahan tersebut di luar kelaziman yang umum berlaku bagi umat Islam dan dukung oleh pendapat mayoritas ulama mazhab bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Para ahli hukum Islam yang menyatakan nikah harus dilakukan dalam satu majelis dengan mengutip pendapat ulama mazhab yang ditulis Abdurrahman al-Jaziri bahwa persyaratan harus dalam satu majelis ini memiliki maksud bahwa *ijab* dan *kabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu yang terpisah. Jika *ijab* dan *kabul* diucapkan dalam satu upacara, *kabul* diucapkan pula pada acara berikutnya, maka akad nikah itu tidak sah meskipun pada tempat (majelis) yang sama, hal ini karena kesinambungan antara *ijab* dan *kabul* tersebut terputus. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis guna terjadinya kesinambungan waktu antara *ijab* dan *kabul* serta tidak ada selingan ucapan yang dapat memutus *ijab* dan *kabul*, oleh karena itu meskipun tempatnya dalam satu majelis dan dalam satu waktu, namun di saat prosesi akad nikah berlangsung ada selingan perbuatan atau percakapan lain, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan pelaksanaan *kabul* sudah tidak terwujud lagi dengan demikian praktik akad nikahnya tidak sah karena ada selingan perbuatan tadinya¹⁰. Jika dicermati titik singgung perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan melalui telepon di atas lebih cenderung mengenai bersatu majelis hubungannya kesinambungan akad nikah, tanpa melihat ada tidaknya alasan pengecualian yang membolehkan pernikahan tidak harus satu majelis karena darurat lantas dapat dipasilitasi dengan sarana telepon. Opini yang demikian seakan menggambarkan kekakuan berpikir seseorang dalam memahami dan mewujudkan hukum Islam bagi para pencari keadilan. Konteksnya pada bahasan ini menghendaki agar tidak ada dikotomi dalam menginterpretasi norma hukum perkawinan, tanpa menghubungkannya dengan Ilmu Hukum Islam.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri. 1990. *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*. Juz 4. Beirut Libanon : Darul Fikr. Hal. 24.

Mengingat hukum perkawinan merupakan sub sistem dari Ilmu hukum Islam (induk hukum Islam), maka untuk memecahkan persoalan perkawinan menggunakan telepon perlu mengikutsertakan ilmu hukum Islam untuk di gali secara integral dan holistik guna memperoleh jawaban atas peristiwa baru dengan mempertimbangkan pada beberapa faktor penyebab munculnya peristiwa, untuk itu diperlukan kreativitas hakim guna menampilkan hukum baru yang berbeda dengan apa yang telah tertuang pada norma hukum sebelumnya. Perbedaan pendapat mengenai nikah menggunakan telepon yang berlatar belakang beda wilayah negara ataupun faktor kondisi alam yang membahayakan jiwa para pihak yang melakukan akad nikah, maka peristiwa akad nikah yang demikian tidak mutlak harus *bersatu majelis*.

Dengan demikian, terjadinya perbedaan pendapat terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang keabsahan perkawinan menggunakan telepon disebabkan pada beberapa pertimbangan hukum:

Pertama, seharusnya Pertimbangan hukum tidak serta merta menggunakan asas pada hadis Nabi Muhammad Saw, riwayat Uqbah bin Amir dan riwayat Ummu Habibah, sebab kedua dalil atau norma tersebut mengarah pada nikah *tawkil* atau nikah perwakilan. Dengan demikian kedua hadis Nabi tersebut sama sekali tidak relevan untuk melegalkan pernikahan melalui media telepon dan tidak perlu dimuat dalam pertimbangan hukum.

Kedua, penggalan fakta dalam proses persidangan, hendaknya majelis hakim mampu menggali alasan yang sangat spesifik terlepas dari alasan ekonomis. Tetapi kemungkinan ada persoalan mendasar yang tidak diungkapkan oleh pemohon pada saat persidangan berlangsung atau karena majelis hakim tidak menggali fakta-fakta yang mengarah pada alasan pribadi atau yang dapat mencoreng nama baik keluarga.

Ketiga, Jika alasan untuk menjaga dan memelihara nama baik keluarga memang merupakan alasan yang kuat, maka dalam pertimbangan hukum dapat dijadikan alasan mendasar (urgen atau darurat) yang memotivasi peristiwa perkawinan melalui media telepon dapat diterima secara logika dan sah menurut hukum Islam, sebagaimana kaidah hukum Islam:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang*¹¹

Mengingat perkawinan sebagaimana bahasan di atas belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, maka untuk menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi dan era globalisasi, sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa kontemporen, sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadis yang ditulis oleh Imam Muslim¹²:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu

Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan dunia masa depan tindak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para yuris (hakim) untuk menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter bersifat elastis dan bukan statis¹³, sebagaimana Abu Ishak al-Syatibi dalam dikutipan

¹¹ Muhlish Usman, 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Perss. hal. 113

¹² Muslim al-Hajjaj. T.th. *Sahih Muslim*. Mesir: Matbaa'ah Misriyyah, wa maktabuha. Jilid II. Hal 340.

¹³ M. Ali Hasan (Trans) 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad. Dyekh Muhammad Ali As-Saayis*. Jakarta: Rajawi Press. Hal. 115.

Abdul Wahhab,¹⁴ agama Islam merupakan agama yang lentur dan toleran, karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya. Dalam kaidah fikih juga dinyatakan :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum lantaran, berubahnya waktu (masa)¹⁵

Maksud kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman, sebab dalam perubahan dan perkembangan zaman tersimpan harapan yang lebih baik yaitu kemaslahatan yang setara dengan perkembangan tersebut. selain itu perubahan zaman berdampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Mengingat hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau umumnya disesuaikan dengan realita kemaslahatan masyarakat pada masa itu, maka relita masa sekarang pun penetapan hukumnya harus disesuaikan dengan kemaslahan masa sekarang.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkawinan melalui media telepon merupakan praktik pernikahan yang tidak memiliki ketentuan hukum Islam sebelumnya, sedangkan yang lazim dilakukan dalam perkawinan Islam bahwa akad nikah dilakukan harus satu majelis dalam menyatukan pihak-pihak yang ber akad agar tidak ada unsur penipuan. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan keabsahan perkawinan melalui media telepon memiliki kelemahan dalam kaidah hukum yang digunakan dan berimplikasi pada perbedaan pendapat di kalangan Ulama, karena tidak mencantumkan kaidah

¹⁴ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama Semarang. Hal. 15.

¹⁵ Imam Musbikin. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah* Cet. I. Jakarta : Rajawali Perss. Hal. 101.

darurat dalam pertimbangan hukumnya.

Keberlakuan hukum perkawinan dalam kajian ilmu hukum dapat dilihat dari faktor keberlakuan yuridis; perkawinan sah jika telah mendapat ketetapan dan tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang. Keberlakuan sosiologis; hukum perkawinan harus bersifat elastis khususnya terhadap persyaratan yang bersifat teknis dengan melihat realitas yang dihadapi masyarakat. Keberlakuan filosofis; penerapan hukum harus adil dan bermanfaat serta mencerminkan sistem nilai tingkah laku masyarakat. Dengan demikian pembaruan hukum perkawinan dapat terjadi sebagaimana bidang hukum lainnya, munculnya perilaku masyarakat yang melaksanakan akad nikah melalui media telepon yang tidak lazim dilakukan berdasarkan hukum perkawinan, dihubungkan dengan teori perubahan hukum dapat diketahui dari beberapa faktor teknis yang intinya karena faktor kondisi *human error*, faktor kondisi alam yang membahayakan dan rekayasa teknologi.

Peluang pembaruan perkawinan sangat memungkinkan karena didukung dengan metode perubahan hukum yakni berdasarkan metode penafsiran hukum, analogi atau argumentasi hukum konteksnya dengan peranan akademis hakim dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Pasal 28 ayat (1). Kreativitas hakim sebagai pembentuk undang-undang kaitannya dengan penetapan akad nikah melalui media telepon, hakim wajib melaksanakan tugas akademis ilmiah untuk menggali norma hukum primer dan sekunder baik menafsirkan atau menggunakan analogi hukum (*qiyas*) bahkan mengupayakan langkah kongkrit lainnya dalam penetapan hukum.

Rekomendasi, akhir dari penulisan ini disarankan bahwa; mengingat penetapan yang di keluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Keabsahan Perkawinan melalui Media Telepon telah disebarluaskan ke seluruh Pengadilan Agama se Indonesia dalam bentuk ketetapan yang berkekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan, meski memiliki kelemahan dalam hal kaidah hukum yang digunakan, disarankan bahwa penetapan tersebut masih dapat dijadikan acuan para hakim lainnya dalam memutuskan peristiwa yang sama.

Memperhatikan bahwa penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang perkawinan melalui media telepon masih memiliki kekurangan dari segi kaidah hukum yang digunakan, kepada para hakim agama yang menemukan peristiwa serupa di wilayah kewenangannya, disarankan dalam penggunaan asas atau kaidah hukum terhadap perkawinan melalui media telepon agar menggali ulang nilai-nilai hukum Islam yang lebih akurat dan relevan dengan peristiwa tersebut demi terciptanya tujuan hukum yang berkeadilan, berdaya guna dan berhasil guna untuk masyarakat, sebab kreativitas hakim akan berdampak pada kredibilitas lembaga peradilan yang menjadi sorotan masyarakat.

Dalam kerangka hukum ke depan (*ius constiuendum*), penetapan yang di hasilkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dijadikan sebagai pintu gerbang untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini belum mengatur secara spesifik tentang status hukum perkawinan melalui media telepon, baik kitab-kitab fikih ataupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya; mengadakan kajian secara komprehensif permasalahan tersebut dalam berbagai aspek; menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik; mengembangkan fikih Islam dengan motivasi ijtihad baik secara individu maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sedang berjalan pada kehidupan masyarakat serta untuk menyatukan berbagai pendapat mazhab tentang berbagai masalah hukum yang serupa demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama.
- Al Hajjaj Muslim. T.th. *Sahih Muslim*. Jilid II. .Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa Maktabuha.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*.Juz 4. Beirut Libanon : Darul Fikr.

- Effendi, Satria. 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media.
- Haroen. Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh* Cetakan II. Jakarta : Logos.
- Hartono, Sunarjati. 1986. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumi
- Hasan, M. Ali, (Trans) 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad. Dyekh Muhammad Ali As-Saayis*. Jakarta: Rajawi Press.
- Muhajir, H. Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.IV Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah* Cet. I. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ungger, Roberto Mangabeira. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Cet. I Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.
- Usman, Muhlish, 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Cet. II. Jakarta : Rajawali Perss.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 tentang Pegawai Pencatat Nikah.
- Salinan Penetapan No. 1751/P/1989. tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Media Telepon dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Departemen Agama. RI. 1994. *Inventarisasi Masalah Ke-penghulu-an*. Surabaya
- . 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Banjarmasin Post. Selasa 9 Januari 2007.